Dewi Mulyati dan M Adi Saputra, Fungsi Ilmu Kedokteran Forensik dalam Penyidikan Pada Kasus Pengguguran Kandungan (Aborsi), Halaman 288-296

FUNGSI ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DALAM PENYIDIKAN PADA KASUS PENGGUGURAN KANDUNGAN (ABORSI)

Dewi Mulyati¹ dan M. Adi Saputra²

¹Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail: dewimulyatiuzier@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

E-mail: muhamadadisaputra99@gmail.com

Abstract

Based on the provisions of the Criminal Code (KUHAP),an investigator must prove whether a criminal act has really occured,in this case an illegal abortion,namely by having evidence as regulated in article 184 of the Criminal Procedure Code.In accordance with this provisions, forensic medical science,in this case a forensic doctor,in conducting research to find the cause of the Crime of illegal abortion (Abortion) in the case which caused the death of the victim, the results of the research from a forensic doctor are outlined in the certificate of the cause of the victim,s death due to an illegal abortion (abortion) in the form of a Visum Et Refertum,this is evidence for investigators to submit the case to Court.

Keywords : forensic medical science, investigation, Abortion

Abstrak

Berdasarkan ketentuan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP), maka seorang penyidik harus membuktikan apa benar telah terjadi suatu tindak pidana dalam hal ini pengguguran kandungan (*Aborsi*) yang sifatnya ilegal, yaitu dengan adanya barang bukti seperti yang diatur di dalam Pasal 184 KUHAP. Sesuai dengan ketentuan ini maka ilmu kedokteran forensik,dalam hal ini seorang dokter forensik dalam melakukan penelitian mencari penyebab dari terjadinya suatu tindak pidana pengguguran kandungan (*Aborsi*) ilegal yang ada pada kasus tersebut yang menyebabkan kematian pada si korban, hasil penelitian dari seorang dokter forensik dituangkan dalam surat keterangan penyebab si korban mengalami kematian akibat pengguguran kandungan (*Aborsi*) ilegal tersebut berupa Visum Et Refertum,ini merupakan alat bukti bagi penyidik untuk mengajukan kasus tersebut ke Pengadilan.

Kata Kunci : Kedokteran Forensik, Penyidikan, Aborsi

PENDAHULUAN

Negara Indonesia menghadapi kasus pengguguran kandungan atau yang dikenal dengan sebutan aborsi yang cukup memprihatinkan, hal ini sebagai contoh terbongkarnya kasus pengguguran kandungan (aborsi) ilegal yang dilakukan oleh seorang dokter gigi di bali di tahun 2023 yang secara keseluruhan berjumlah 1300 pasien.

Dengan mengingat begitu riskan nya perbuatan Pengguguran kandungan (*aborsi*) ilegal ini maka fungsi ilmu kedokteran forensik sangat di perlukan tidak saja semata-mata bermanfaat dalam hal penegakan hukum dan keadilan dilingkup pengadilan,akan tetapi bermanfaat juga dalam berbagai kehidupan dimasyarakat. Dalam hal ini untuk

Dewi Mulyati dan M Adi Saputra, Fungsi Ilmu Kedokteran Forensik dalam Penyidikan Pada Kasus Pengguguran Kandungan (Aborsi), Halaman 288-296

terlaksananya secara maksimal dalam memberikan bantuan data dan hal-hal yang berhubungan dengan tindak pidana pengguguran kandungan (*aborsi*) tersebut maka seorang dokter forensik benar-benar harus semaksimal mungkin menunjukkan kemampuannya dalam bidang ilmu yang dimilikinya.¹

Pengguguran kandungan atau yang dikenal dengan *Aborsi* adalah menyangkut dalam bidang kesehatan masyarakat hal ini berhubungan terhadap rasa sakit dan bisa menyebabkan terjadinya kematian pada si ibu yang menjadi korban *aborsi* tersebut. Ada beberapa hal yang merupakan penyebab terjadinya kematian pada si ibu yang melaksanakan *aborsi* tersebut yaitu terjadinya pendarahan, infeksi dan eklampsia.²

Bagi pelaku pengguguran kandungan (*Aborsi*) di Indonesia yang sifatnya ilegal akan mendapatkan sanksi berupa pidana, selain di Indonesia banyak di beberapa negara antara lain di Eropa Barat, negara – negara tersebut memberikan sanksi

hukuman terhadap pelaku pengguguran kandungan atau *aborsi* tersebut, akan tetapi dengan

pengecualian yaitu bila hal tersebut berhubungan dengan adanya indikasi medis yang mengancam keselamatan si ibu maka pengguguran kandungan atau *aborsi* di perbolehkan, sedangkan di negara-negara Eropah Timur, pengguguran kandungan atau *aborsi* dizinkan akan tetapi harus dilaksanakan oleh tenaga dokter yang ahli di rumah sakit dengan tanpa biaya, sedangkan di negara Jerman Barat, terhadap pengguguran kandungan atau *aborsi* dapat dilakukan dengan batasan janin dari berumur 14 sampai dengan 3 bulan, serta harus berdasarkan izin si ibu dan ini juga atas saran dokter dan dilaksanakan oleh dokter, maka pengguguran kandungan atau *aborsi* tersebut tidak dikenakan hukuman.³

Di Indonesia untuk kasus pengguguran kandungan (*aborsi*) ini agak sulit sampai ke pengadilan, hal ini disebabkan karena pada umumnya si ibu sendiri yang merupakan pelaku pengguguran kandungan atau *aborsi*, sehingga tidak mungkin si pelaku tersebut akan melaporkan kasus yang

¹ Stephanie Cetra Sari, dkk, *Makalah Forensik*, Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti Jakarta. 2010.

² Stephanie

³ Ningrum, *Aborsi Dalam Kaitannya Dengan Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*, 2009

Dewi Mulyati dan M Adi Saputra, Fungsi Ilmu Kedokteran Forensik dalam Penyidikan Pada Kasus Pengguguran Kandungan (Aborsi), Halaman 288-296

dilakukannya pada pihak penegak hukum, dan biasanya kasus pengguguran kandungan atau aborsi bisa sampai ke pengadilan apabila telah terjadinya kematian atau komplikasi pada si ibu yang disebabkan oleh pengguguran kandungan atau aborsi yang secara ilegal tersebut.⁴

Berdasarkan apa yang telah dijabarkan pada penjelasan sebelumnya maka penulis akan membahas mengenai Fungsi Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Penyidikan Pada Kasus Pengguguran Kandungan (Aborsi).

PEMBAHASAN

Pada saat ini dimana zaman teknologi yang semakin canggih dan berbagai media elektronik dan media cetak semakin banyak maka pemberitaan sekecil apapun terutama kasus-kasus yang sifatnya kriminal semakin mudah untuk diakses ditengah masyarakat, serta semakin canggihnya pelaku kejahatan melakukan kejahatan dengan berbagai motif dan cara pelaku kejahatan tersebut dalam melaksanakan kejahatannya, hal ini menuntut para penegak hukum untuk dapat lebih berinovasi dalam mengungkap suatu kasus kriminal tersebut, sehingga

mereka benar-benar untuk jeli dan tanggap terhadap pencarian barang bukti yang dapat menjerat si pelaku kejahatan tersebut antara lain dalam pencarian barang bukti tersebut adalah dengan menggunakan metode scientific salah satunya dengan menggunakan ilmu forensik⁵

Dalam Ilmu Kedokteran Forensik, maka Forensik selalu dihubungkan dengan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, selain itu dalam buku-buku yang membahas mengenai ilmu forensik maka ilmu ini merupakan ilmu yang bertujuan untuk membantu para penegak hukum terutama pada tahap penyidikan untuk mendapatkan barang bukti berdasarkan hasil Visum dari kedokteran forensik tersebut.⁶

Selain itu selaku seorang Dokter yang ahli dibidang forensik maka dalam hal penyidikan seorang dokter forensik berfungsi untuk membantu pemeriksaan terhadap objek penyidik sesuai dengan bidang keahliannya dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut harus sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang, hal ini juga tidak terlepas dari keilmuan yang ada

⁴ Ningrum

⁶ Ayu Siva Budi, dkk, *Tempat Kejadian Perkara Dan Bukti Fisik*, Makalah Forensik Politeknik Banten, 2015.

Dewi Mulyati dan M Adi Saputra, Fungsi Ilmu Kedokteran Forensik dalam Penyidikan Pada Kasus Pengguguran Kandungan (Aborsi), Halaman 288-296

padanya baik berdasarkan tata laksana medeko legal, tanologi,traumalogi,taksilogi, teknik pemeriksaan dan hal-hal yang berhubungan dengan objek yang berguna bagi penyidikan dan dibutuhkan dalam pengadilan.⁷

Salah satu pengertian dari Forensik adalah suatu ilmu pengetahuan yang berfungsi untuk membantu dalam hal tegaknya suatu keadilan,yang berhubungan dengan hal-hal kejahatan seperti dibidang hukum pidana, dibidang hukum acara pidana juga dalam beberapa bidang kedokteran Forensik ilmu kimia forensik,psikologi forensik dan bidang-bidang lainnya.dan bagi seorang ahli dibidang ini dikatakan sebagai ahli forensik.⁸

Adapun kaitannya kedokteran forensik dan pengguguran kandungan (*aborsi*), maka kedokteran forensik berdasarkan penelitiannya dapat mencari motif dari dilakukannya aborsi serta cara-cara dalam terjadinya aborsi tersebut yang dilakukan oleh sipelaku. Ada beberapa cara yang sering di pakai dalam *abortus provocatus*, hal ini

berkaitan dengan penyidikan dan pemeriksaan mayat serta ini juga dapat

menjelaskan keterkaitan tindakan pengguguran kandungan (*aborsi*) dan kematian pada wanita yang melakukan pengguguran kandungan (*aborsi*) tersebut. Dalam hal ini cara yang dipakai disesuaikan dengan usia kehamilan, karena semakin tua usia kehamilan dari seorang wanita maka semakin besar resiko kematian si wanita yang melakukan aborsi tersebut, hal –hal tersebut harus dipahami oleh seorang penyidik dalam mencari bukti-bukti terhadap perbuatan aborsi tersebut.⁹

Dalam melaksanakan pengguguran kandungan atau aborsi terdapat dua jenis aborsi yang dikenal dalam ilmu kedokteran, pertama aborsi spontan yang terjadi secara alamiah dan biasanya terjadi pada saat janin masih dibawah usia 28 minggu.dan hal ini disebabkan karena penyakit yang ada pada si ibu yang berhubungan dengan kelainan pada sistem reproduksi pada si ibu. Yang kedua adalah aborsi buatan untuk aborsi ini adanya unsur kesengajaan yang

⁷ Stephanie Cetra Sari, dkk, *Makalah Forensik*.

⁸ Stephanie

⁹ <https://www..academia.edu/19160680/peran-ilmu-kedokteran-forensik>, 2019.

Dewi Mulyati dan M Adi Saputra, Fungsi Ilmu Kedokteran Forensik dalam Penyidikan Pada Kasus Pengguguran Kandungan (Aborsi), Halaman 288-296

dilakukan oleh seorang wanita untuk mengeluarkan janin yang ada di rahimnya, sehingga menyebabkan kematian si janin tersebut.¹⁰

Dalam hukum aborsi buatan terdapat dua jenis yaitu pertama aborsi buatan legal yaitu pengguguran kandungan dilakukan berdasarkan syarat-syarat yang diizinkan oleh undang-undang dikarenakan demi menyelamatkan si ibu, aborsi ini biasa dikenal dengan istilah *abortus provocatus therapeutus*. Kedua dikenal dengan aborsi buatan ilegal yaitu aborsi yang dilakukan dengan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk didapat dilakukan pengguguran kandungan tersebut, dan pengguguran ini dilakukan dengan adanya unsur kriminal yang dikenal sebagai *abortus provocatus criminalis*.¹¹

Pada kenyataannya untuk kasus aborsi buatan ilegal ini jarang sampai pada tahap penyidikan hal ini disebabkan antara wanita yang melakukan aborsi buatan ilegal tersebut dengan orang yang membantu melakukan pengguguran kandungan atau aborsi secara ilegal sudah sama-

sama sepakat untuk tidak saling membongkar perbuatan mereka tersebut, sehingga perbuatan pengguguran kandungan ilegal ini akan sulit untuk terdeteksi oleh penyidik.¹²

Dalam hukum pidana Di Indonesia pasal-pasal mengenai pengguguran kandungan atau Aborsi ini diatur didalam pasal 346 KUHP sampai dengan pasal 350 KUHP, dimana pasal-pasal ini memasukkan perbuatan pengguguran kandungan atau aborsi sebagai suatu delik kejahatan terhadap nyawa serta pasal 299 KUHP memasukkan pengguguran kandungan sebagai pelanggaran terhadap delik kesusilaan, akan tetapi KUHP Indonesia sekarang yang dipakai memasukkan semua perbuatan pengguguran kandungan atau abortus provocatus tanpa kecuali sebagai suatu perbuatan pidana.¹³

Walaupun didalam hukum positif yang ada di Indonesia tidak memperbolehkan terhadap perbuatan aborsi, namun dalam kenyataan aborsi masih sering dilakukan oleh praktisi medis. Adapun yang mengatur mengenai aborsi ini selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁰ Syarifuddin, *Abortus Provocatus dan Hukum*, USU, 2003

¹¹ Syarifuddin

¹² Syarifuddin

¹³ Syarifuddin

Dewi Mulyati dan M Adi Saputra, Fungsi Ilmu Kedokteran Forensik dalam Penyidikan Pada Kasus Pengguguran Kandungan (Aborsi), Halaman 288-296

(KUHP) diatur juga pada Undang-Undang Kesehatan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 diatur dalam pasal 60, sedangkan ketentuan pidananya diatur dalam pasal 472.

Adapun Undang-Undang kesehatan ini memberikan beberapa kriteria untuk dapat dilakukan aborsi, pertama aborsi dapat dilakukan apabila dilakukan oleh tenaga medis yang berkopetensi dan mempunyai kewenangan dalam hal itu, kedua aborsi dapat dilakukan bila memenuhi syarat fasilitas yang telah ditentukan oleh Menteri Kesehatan, ketiga Aborsi dapat dilakukan atas persetujuan si wanita yang hamil beserta sang suami, kecuali wanita korban dari perkosaan (pasal 60 ayat 2 Undang-undang no.17 Tahun 2023).

Selain itu KUHP mengatur mengenai beberapa pasal yang berkaitan dengan aborsi, yaitu pasal 299 KUHP dimana seseorang yang memberikan pengobatan yang bertujuan untuk menggugurkan kandungan dari seorang wanita, kemudian orang yang melakukan perbuatan melakukan pengguguran tersebut merupakan mata pencariannya, maka terhadapnya dapat dikenakan pidana Selanjutnya pasal

346 KUHP melarang terhadap wanita yang dengan sengaja menggugurkan kandungan, atau dengan meminta bantuan orang lain bukan dengan alasan medis, maka terhadapnya juga dikenai pidana. Pasal 347 KUHP dan Pasal 348 KUHP juga memberikan pidana bagi seseorang yang menggugurkan kandungan terhadap se orang wanita dengan tanpa seizin dari wanita tersebut dan apabila perbuatannya tersebut sampai menyebabkan kematian si wanita maka pidana nya bisa mencapai lima belas tahun penjara. Selanjutnya Pasal 348 KUHP sampai menyebabkan kematian pada wanita itu.

Dalam Kode Etik Kedokteran dinyatakan bahwa seorang dokter didalam menjalankan tugas nya harus benar-benar tulus dan ikhlas dalam melakukan pengobatan terhadap pasien sesuai dengan kemampuan nya dan bila tidak mampu maka bila ada persetujuan dari si pasien dia dapat merujuk ke dokter lain yang lebih ahli dan sesuai dengan bidangnya.

Selanjutnya seorang Dokter yang terkenal yaitu Dr. Handrawan Nadesul beliau merupakan pengamat kesehatan, mengatakan ada tujuh hal menjadi penyebab pemicu adanya

Dewi Mulyati dan M Adi Saputra, Fungsi Ilmu Kedokteran Forensik dalam Penyidikan Pada Kasus Pengguguran Kandungan (Aborsi), Halaman 288-296

prilaku aborsi atau pengguguran kandungan yaitu diakibatkan oleh siaran televisi yang lebih vulgar dalam menayangkan hal-hal mengenai seksualitas, kemudian juga disebabkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada batasan lagi berbeda dengan masa lalu., selanjut nya makin longgar nya Nilai-nilai yang ada di masyarakat dimana kalau dahulu hal-hal yang sifatnya pribadi sangat dirahasiakan tetapi sekarang alat kontrasepsi, seks illegal, aksesori seks, reparasi selaput dara dan lain lain-lain yang sifatnya pribadi untuk sekarang tidak dipermasalahkan lagi.juga disebabkan kesibukan orang tua yang mengakibatkan kurang nya pendidikan agama bagi anak-anak sehingga berdampak bagi perkembangan moral anak-anak, juga diakibatkan perkembangan untuk usia pubertas anak-anak sekarang lebih dini dibandingkan orang-orang terdahulu, serta masyarakat moderen lebih memandang seks sebagai hiburan daripada prorekreasi,dan demikian maraknya industri dunia periklanan.Hal-hal ini lah menurut Dr.Handrawan yang menjadi pemicu banyak nya kasus aborsi.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) untuk dapat diajukan suatu kasus kejahatan harus berdasarkan barang bukti,yang memenuhi syarat yaitu minimal dua barang bukti (*Unus Testis Nullus Testis*), ketentuan barang bukti tersebut seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP, sehingga seorang penyidik untuk dapat mengajukan suatu kasus kejahatan pengguguran kandungan (*Aborsi*) harus melengkapi barang bukti tersebut yang menyatakan sebagai kasus pengguguran kandungan (*Aborsi*). Dalam pencarian barang bukti tersebut maka pasal 102 KUHP menyatakan bahwa bila mengetahui serta menerima laporan atau pengaduan bahwa telah terjadi tindak pidana atau diduga sebagai suatu tindak pidana, maka terhadap penyidik wajib untuk melakukan penyidikan pada tempat-tempat manapun yang ada hubungan dengan tindak pidana tersebut,termasuk tempat praktek Dokter-dokter yang di duga tempat melakukan aborsi secara illegal.¹⁴

Selain itu pada pasal 7 KUHP juga memberikan beberapa kewenangan pada penyidik dalam hal

¹⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Dewi Mulyati dan M Adi Saputra, Fungsi Ilmu Kedokteran Forensik dalam Penyidikan Pada Kasus Pengguguran Kandungan (Aborsi), Halaman 288-296

mendapat laporan atau pengaduan telah terjadinya tindak pidana maka dapat melakukan tindakan awal di tempat kejadian perkara pidana, dan dapat menghentikan seseorang tersangka serta memeriksa tanda pengenalnya, selanjutnya dapat melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan terhadap barang-barang yang diduga berhubungan dengan tindak pidana tersebut.

Dan apabila seorang penyidik kepolisian sudah mengetahui dengan sendirinya suatu tempat praktek dokter yang sedang atau telah melakukan tindak pidana pengguguran kandungan (*aborsi*) secara ilegal dan serta ditemui bukti-bukti untuk hal tersebut yang mengarah pada seseorang maka hal ini dapat dikatakan tertangkap tangan, maka dalam hal ini penyidik berhak untuk melakukan penyidikan ditempat tersebut tanpa adanya larangan dalam mengungkap kasus *aborsi* yang telah terjadi.¹⁵

KESIMPULAN

Berdasarkan ketentuan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka seorang penyidik

harus membuktikan apa benar telah terjadi suatu tindak pidana dalam hal ini pengguguran kandungan (*Aborsi*) yang sifatnya ilegal, yaitu dengan adanya barang bukti seperti yang diatur di dalam Pasal 184 KUHP. Sesuai dengan ketentuan ini maka ilmu kedokteran forensik, dalam hal ini seorang dokter forensik dalam melakukan penelitian mencari penyebab dari terjadinya suatu tindak pidana pengguguran kandungan (*Aborsi*) ilegal yang ada pada kasus tersebut yang menyebabkan kematian pada si korban, hasil penelitian dari seorang dokter forensik dituangkan dalam surat keterangan penyebab si korban mengalami kematian akibat pengguguran kandungan (*Aborsi*) ilegal tersebut berupa *Visum Et Refertum*, ini merupakan alat bukti bagi penyidik untuk mengajukan kasus tersebut ke Pengadilan.

¹⁵ Andi Hamzah

Dewi Mulyati dan M Adi Saputra, Fungsi Ilmu Kedokteran Forensik dalam Penyidikan Pada Kasus Pengguguran Kandungan (Aborsi), Halaman 288-296

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Ayu Siva Budi, dkk, *Tempat Kejadian Perkara Dan Bukti Fisik*, Makalah Forensik Politeknik Banten, 2015.

https://www.academia.edu/19160680/peran_ilmu_kedokteran_forensik, 2019.

Ningrum, *Aborsi Dalam Kaitannya Dengan Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*, 2009.

Stephanie Cetra Sari, dkk, *Makalah Forensik*, Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti Jakarta. 2010.

Syarifuddin, *Abortus Provocatus dan Hukum*, USU, 2003.